



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 60 TAHUN 2020**

Tentang

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2021**

**BADAN KEUANGAN
Sarilamak, AGUSTUS 2020**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota telah berhasil menyelesaikan PD) Tahun 2021.

Renja PD ini disusun untuk dijadikan pedoman dan acuan bagi setiap elemen Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai pelaksana fungsi penunjang bidang keuangan serta tugas pembantuan dalam melaksanakan aktifitas, sehingga rencana penerimaan (target) yang telah ditetapkan dapat terpenuhi. Dan merupakan bentuk komitmen penuh organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dalam mewujudkan visi Kabupaten Lima Puluh Kota, yakni "Terwujudnya Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel". Dengan demikian, dokumen Renja PD Tahun 2020 ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen-dokumen yang lain, seperti Rencana Strategis Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Usaha maksimal telah dilakukan dalam penyusunan dokumen Renja PD Tahun 2021 ini, namun kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna dan memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut di masa mendatang. Oleh karena itu, masukan-masukan positif dan konstruktif bagi penyempurnaan dokumen ini tetap diperlukan.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita dalam melaksanakan tugas-tugas ke depan.

Sarilamak, Agustus 2020

**KEPALA BADAN KEUANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**IRWANDI.S.Sos.MM
NIP. 19660913 198603 1 009**



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4121);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590) ;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 144);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2018 Nomor 1);

20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140).
21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah satuan kerja di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.
10. Kebijakan Umum Anggaran, yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang

diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.

12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pasal 2

Maksud penyusunan Renja PD adalah untuk :

- a. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2021 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD; dan
- b. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing PD untuk tahun 2021.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renja PD adalah untuk :

- a. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2021;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
- c. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD tahun 2021.

BAB II

SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra PD

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Kepala PD menyusun Renja PD Tahun 2021 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2021 dan Renstra PD,
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran dari RKPD,
- (3) PD menyusun RKA Tahun 2021 dengan berpedoman kepada Renja PD.

Pasal 6

Agar program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja PD dapat dilaksanakan serta untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan, maka PD harus memastikan substansi Renja PD dapat dituangkan ke dalam DPA PD Tahun 2021.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan Renja PD ini bersumber dari APBD Kabupaten.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD.
- (2) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 5 Agustus 2020

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd

IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 5 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd

WIDYA PUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2020 NOMOR 60



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	
TAHUN LALU	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Keuangan	
Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Keuangan	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan.....	33
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	
Badan Keuangan	35
2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD	38
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..	47
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	50
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	51
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	52
3.3. Program dan Kegiatan (di tahun 2021 dalam Renstra)	55
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	
PERANGKAT DAERAH	69
BAB V : PENUTUP	106

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Keuangan Dan Pencapaian Renstra Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota s/d 2021	10
Tabel T.C.30	Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kepala Badan Keuangan	34
Tabel 2.4.	Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2020 Kab. Lima Puluh Kota	16
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021	47
Tabel 3.1.	Program dan Kegiatan yang ada pada setiap OPD	57
Tabel 3.2.	Program dan Kegiatan lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah ..	58
Tabel 3.3.	Program dan Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan	60
Tabel 4.1.	Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 (Sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2006).... ..	70
Tabel 4.2.	Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah (Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019)	80
	Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Pengertian RENJA

Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Semua jenis perencanaan ini merupakan dokumen perencanaan di tingkat kabupaten, sedangkan untuk tingkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga dilakukan penyusunan perencanaan, yaitu Rencana Strategis OPD (Renstra-OPD) dengan ruang lingkup waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja OPD (Renja-OPD) dengan ruang lingkup waktu 1 (satu) tahun.

Selanjutnya sebagai salah satu OPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Badan Keuangan juga perlu menyusun perencanaan tahunan, yaitu berupa Rencana Kerja Badan Keuangan (Renja-BK). Renja Badan Keuangan Tahun 2021 mengacu kepada visi misi Bupati terpilih.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap

kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan :

1. Sustansi Renja OPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja OPD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja OPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA OPD setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyusunan Renja
 - ✓ Pembentukan Tim Penyusun Renja
 - ✓ Orientasi mengenai Renja
 - ✓ Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
 - ✓ Pengumpulan Data dan Informasi

- b. Pengolahan Data dan Informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.

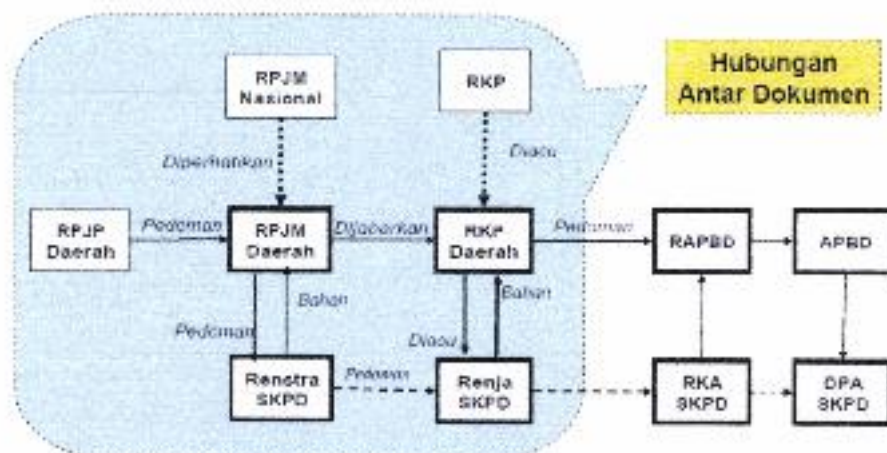
- c. Tahap Perumusan Rancangan Renja
 - ✓ Pengolahan data dan informasi
 - ✓ Analisis gambaran pelayanan OPD

- ✓ Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD
 - ✓ Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
 - ✓ Telaah terhadap rancangan awal RKPD
 - ✓ Perumusan tujuan dan sasaran
 - ✓ Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
 - ✓ Perumusan kegiatan prioritas
 - ✓ Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD
 - ✓ Penyempurnaan rancangan kerja OPD
 - ✓ Pembahasan forum OPD; dan
 - ✓ Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.
- d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja
- e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan Renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD
- f. Penetapan Renja

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah



Penyusunan RPJMD ini dilaksanakan dalam rangka menjabarkan RPJPD , penyusunan RPJMD ini didasari oleh visi dan misi serta program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya penyusunan RPJMD ini merupakan penyusunan RPJMD tahap ke dua dalam ruang lingkup RPJPD 2005-2025.

Pada tingkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 ini secara lebih teknis dan operasional dijabarkan kedalam Renstra OPD, dimana muatan yang terkandung dalam Renstra adalah visi dan misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing selama lima tahun kedepan. Program dan Kegiatan OPD tersebut tentunya merupakan pelaksanaan sebagian kebijakan dan program Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021.

Terkait dengan Renstra OPD tersebut, maka Badan Keuangan telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra Badan Keuangan) Tahun 2016-2021.

Selanjutnya sebagai salah satu OPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota , Badan Keuangan juga perlu menyusun perencanaan tahunan, yaitu berupa Rencana Kerja Badan Keuangan (Renja Badan Keuangan). Renja Badan Keuangan ini merupakan penjabaran dari Renstra Badan Keuangan. Oleh karena itu, sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa setelah RKPD ditetapkan , Kepala OPD harus segera menetapkan Renja OPD masing-masing, Maka Badan Keuangan harus segera menyusun dan menetapkan Renja Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun

2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 7);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua Pembentukan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan ini adalah untuk :

1. Menjabarkan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Periode 2016-2021 yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 yang menjadi tanggung jawab Badan Keuangan secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan dan fungsi Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2019 sesuai dengan urusan dan kewenangan Badan Keuangan.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Badan Keuangan untuk Tahun 2021.

Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja Badan Keuangan ini ditujukan untuk :

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Badan Keuangan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2021.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Badan Keuangan..
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Keuangan pada Tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Keuangan Tahun 2021 ini terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang serta maksud dan tujuan penyusunan Renja Badan Keuangan, landasan hukum, serta sistematika penulisan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Tahun 2021

Memberikan Gambaran hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2019-2020 dan capaian terhadap target Renstra Badan Keuangan hingga tahun 2020, analisis kinerja pelayanan Badan Keuangan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Keuangan, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat;

Bab III : Tujuan dan Sasaran OPD

Berisi tentang : telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja Badan Keuangan, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan

Berisi tentang : Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

Bab V : Penutup

Lampiran

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Keuangan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Keuangan.

Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Keuangan tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun 2020 (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun 2020 yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Keuangan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Badan Keuangan tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Keuangan tahun 2019, dan realisasi Renstra Badan Keuangan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan badan Keuangan dan/atau realisasi APBD untuk Badan Keuangan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Keuangan.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil Keluaran Yang Direncanakan

Pada Tahun 2019, program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan yaitu pada program Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penyusunan Analisis Standar Belanja yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 51.781.313,- realisasi keuangan Rp. 36.361.000,- realisasi fisik kegiatan 60 %. Keluaran dari Kegiatan ini yaitu Tersusunnya Buku Satuan Anggaran Belanja dan Tersusunnya Analisis Standar Belanja untuk Tahun 2020. Kegiatan ini tidak mencapai target karena ASB kegiatan yang telah di ASB-kan tahun sebelumnya masih bisa dipakai untuk tahun 2020.
2. Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 383.517.655,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 150.364.168,- (96,22%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 50%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya sertifikat tanah 15 persil, pancang tanah 34 buah, penghapusan 30, balik nama 300 sertifikat, dengan capaian kinerja berupa Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Kegiatan ini tidak mencapai target karena kelengkapan data yang tidak dapat dipenuhi oleh OPD dan sekolah-sekolah sehingga pihak BPN menolak berkas yang diusulkan

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

Pada Tahun 2019 Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.607.000,- dan realisasi

keuangan sebesar Rp. 16.603.500,- (99,97%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat berupa materai perangko biasa 52 bh, perangko kilat 50 bh, materai 3000 760 bh, materai 6000 1502 bh, cek bank nagari 41 bh dengan capaian kinerja berupa Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan.

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air, dan Listrik yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 174.600.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 158.496.168,- (90,78%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air, listrik, telepon 12 bulan dengan capaian kinerja berupa Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan.
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 328.902.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 276.139.000,- (83,96%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan jasa administrasi keuangan, pelayanan belanja hibah bansos, transfer nagari dan bantuan keuangan kepada pihak lain, dengan capaian kinerja berupa Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan.
4. Kegiatan Penyediaan ALat Tulis Kantor yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 136.637.292,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 136.628.150,- (99,96%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan penyediaan alat tulis kantor dan terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan, dengan capaian kinerja berupa Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan.
5. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 223.724.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 215.807.250,- (96,46%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah

tersedianya kebutuhan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 12 bulan, dengan capaian kinerja berupa Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan.

6. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 36.526.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 33.292.500,- (91,15%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan untuk Bangunan Kantor 12 bulan, dengan capaian kinerja berupa Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan.
7. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.442.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 19.662.750,- (83,88%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan, dengan capaian kinerja berupa Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan.
8. Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 38.806.900,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 37.572.900,- (96,82%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga 12 bulan, dengan capaian kinerja berupa Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan.
9. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.950.160,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.920.000,- (79,60%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 bulan, dengan capaian kinerja berupa Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan.
10. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 161.810.000,- dan realisasi keuangan sebesar

Rp. 144.840.000,- (89,51%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya makan dan minum untuk rapat, tamu dan pegawai untuk 12 bulan, dengan capaian kinerja berupa Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan.

11. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 382.208.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 354.440.180,- (92,73%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah untuk 12 bulan, dengan capaian kinerja berupa Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 276.060.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 265.050.000,- (96,01%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya kendaraan dinas/operasional 1 unit, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
2. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.049.048.100,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.034.603.100,- (98,62%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya peralatan gedung kantor, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Kegiatan Pengadaan Mebeleur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 410.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 400.874.000,- (97,77%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya Mebeleur, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
4. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 603.075.000,- dan realisasi keuangan sebesar

Rp. 596.185.741,- (98,86%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

5. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 252.007.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 237.762.277,- (94,35%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
6. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 76.650.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 70.253.000,- (91,65%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan gedung kantor, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 48.200.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 47.443.000,- (98,43%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya peningkatan disiplin aparatur.

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 45.270.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 40.147.500,- (88,68%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya peningkatan sumber daya aparatur.

2. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 540.100.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 535.088.120,- (99,07%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya peningkatan sumber daya aparatur.
- E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 56.982.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 52.989.000,- (92,99%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 2. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 85.731.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 73.143.700,- (85,32%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 3. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Pronosis dan Realisasi Anggaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 66.455.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 64.513.000,- (97,08%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Penyusunan Pelaporan Pronosis dan Realisasi Anggaran, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 4. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.415.000,- dan realisasi keuangan sebesar

Rp. 7.438.000,- (88,39%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Penyusunan Pelaporan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

F. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Kegiatan Penyusunan Analisis Standar Belanja yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 51.781.313,- realisasi keuangan Rp. 36.361.000,- realisasi fisik kegiatan 60 %. Keluaran dari Kegiatan ini yaitu Tersusunnya Buku Satuan Anggaran Belanja dan Tersusunnya Analisis Standar Belanja untuk Tahun 2020. Kegiatan ini tidak mencapai target karena ASB kegiatan yang telah di ASB-kan tahun sebelumnya masih bisa dipakai untuk tahun 2020.
2. Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 32.145.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 25.486.000,- (79,28%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Penyusunan Standar Satuan Harga, dengan capaian kinerja berupa Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 68.098.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 53.228.510,- (78,16%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, dengan capaian kinerja berupa Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 66.439.700,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 63.717.000,- (95,90%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan capaian kinerja berupa Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 168.822.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 148.162.985,- (87,76%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD (150 Buku), Rancangan Perda APBD 2020 (150 Buku) serta Nota keuangan APBD 2020 (70 Buku), dengan capaian kinerja berupa Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 101.910.250,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 76.930.200,- (75,49%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD (400 Buku), dengan capaian kinerja berupa Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 130.292.750,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 114.085.272,- (87,56%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD (300 Buku) serta Nota Keuangan APBD 2019 (70 Buku), dengan capaian kinerja berupa Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.144.750,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 128.997.200,- (85,91%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD (600 Buku), dengan capaian kinerja berupa Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 117.978.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 113.289.215,- (96,02%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1 perda), dengan capaian kinerja berupa Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

10. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 106.831.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 102.166.200,- (95,63%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1 Perbup), dengan capaian kinerja berupa Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 64.614.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 63.927.600,- (95,63%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah (12 Bulan), dengan capaian kinerja berupa Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 667.055.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 641.868.528,- (96,22%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (12 Bulan), dengan capaian kinerja berupa Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 363.517.655,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 150.364.168,- (96,22%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 50%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya sertifikat tanah 15 persil,

pancang tanah 34 buah, penghapusan 30, balik nama 300 sertifikat, dengan capaian kinerja berupa tertibnya administrasi pengelolaan barang milik daerah. Kegiatan ini tidak mencapai target karena kelengkapan data yang tidak dapat dipenuhi oleh OPD dan sekolah-sekolah sehingga pihak BPN menolak berkas yang diusulkan.

14. Kegiatan Peningkatan Manajemen Investasi Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 65.530.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 56.699.700,- (86,52%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya konsultasi tentang investasi daerah 2 orang dan tersusunnya dokumen tentang Investasi Daerah 1 Dokumen (40 rangkap), dengan capaian kinerja berupa Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Kegiatan Penyusunan Standarisasi Sarana dan Prasarana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 61.705.350,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 50.702.047,- (82,17%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya standarisasi sarana dan prasarana (60 buku) dengan capaian kinerja berupa tertibnya administrasi pengelolaan barang milik daerah.
16. Kegiatan Penyusunan dokumen pelaksanaan perubahan APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 54.090.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 45.072.000,- (83,33%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) TA 2019 (506 Buku) dengan capaian kinerja berupa Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Kegiatan Penyusunan dokumen pelaksanaan APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 53.605.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 50.911.000,- (94,97%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) TA 2019 dan DPA Revisi Tahun 2019 (506 buku DPA

dan 330 buku DPA revisi) dengan capaian kinerja berupa Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

18. Kegiatan Rekonsiliasi Data Akuntansi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.633.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 19.459.800,- (75,92%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya - Rekonsiliasi Data Akuntansi dengan OPD (6 kali), Data Keuangan Yang Akuntabel (30 dokumen), Rekonsiliasi Data Akuntansi Dana Transfer dengan Pusat (2 kali), Rekonsiliasi Data Akuntansi dengan Provinsi (8 kali) dengan capaian kinerja berupa tertibnya administrasi pengelolaan barang milik daerah.
19. Kegiatan Pemuktahiran data aset daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 554.389.990,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 508.568.432,- (91,73%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya Buku Lampiran Aset (20 buah), Laporan Sesteran Aset (10 buku), Laporan Tahunan (10 buku) dengan capaian kinerja berupa tertibnya administrasi pengelolaan barang milik daerah.
20. Kegiatan Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 80.768.950,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 57.801.500,- (92,11%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya Buku Inventaris (15 buku), dengan capaian kinerja berupa tertibnya administrasi pengelolaan barang milik daerah.
21. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Barang Milik Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 55.313.550,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 50.948.500,- (71,56%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya Buku RKBMD, RKPMD dan status penetapan BMD (25 buku), dengan capaian kinerja berupa tertibnya administrasi pengelolaan barang milik daerah.

22. Kegiatan Penetapan Pajak dan Retribusi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 76.526.150,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 50.948.500,- (66,58%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya penelitian terhadap wajib pajak dan wajib retribusi (2000 SKP), dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah.
23. Kegiatan Koordinasi dan Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 109.823.453,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 104.789.600,- (95,42%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Koordinasi dan Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah.
24. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Sismop dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 831.088.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 744.851.837,- (89,62%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pendataan/Pemutakhiran data PBB di IKK (16000 Data), dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah.
25. Kegiatan Monitoring dan Rekonsiliasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.506.350,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 40.394.400,- (79,98%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya rekon dengan instansi sektoral dan pemprof (6 kali), dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah.
26. Kegiatan Pendataan, Pemutakhiran dan Pengembangan Data Potensi Pajak dan Retribusi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 78.748.935,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 78.101.200,- (99,18%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pendataan wajib pajak (45 OP Baru, 20 pemutakhiran),

dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah.

27. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pendapatan Daerah (Penagihan) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 85.370.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 72.429.968,- (84,84%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya Ranperbup (3 Ranperbup), Surat Keputusan (6 SK), dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah.
28. Kegiatan Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 184.733.012,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 180.460.128,- (97,69%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah.
29. Kegiatan Penyusunan Regulasi Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29.789.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 24.630.000,- (82,68%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah.
30. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 65.451.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 46.258.800,- (70,68%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah (12 Bulan), dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah.
31. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 405.380.000,- dan realisasi keuangan sebesar

Rp. 258.594.367,- (62,80%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya Laporan Keuangan Daerah (2 dokumen), dengan capaian kinerja berupa Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

32. Kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 48.645.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 28.426.500,- (58,44%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya KUA dan PPAS (4 dokumen), dengan capaian kinerja berupa Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

33. Kegiatan Penyusunan Rancangan Kebijakan Anggaran Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 170.906.750,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 112.413.461,- (65,77%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya Rancangan Kebijakan Anggaran Daerah (4 Dokumen), dengan capaian kinerja berupa Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

G. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.501.052.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.356.747.700,- (92,39%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Sosialisasi TNT (2 Kali)- Asistensi Simgaji (12 Bulan)- Sosialisasi Tata Kelola Keuangan Daerah (1 Kali), MOU lembaga Perbankan serta lembaga keuangan lainnya, Workshop pengelolaan Keuangan daerah (1 Kali), dengan capaian kinerja berupa Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Kegiatan Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.819.340.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.761.907.546,- (96,84%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya Tim Anggaran

Pemerintah Daerah (12 Bulan), dengan capaian kinerja berupa Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Kegiatan Penyuluhan Pajak Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 118.340.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 86.344.000,- (72,96%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyuluhan pajak daerah kepada Aparatur Pemerintahan Nagari dan Wajib Pajak (320 Orang) dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah.
4. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kinerja Tim Intensifikasi PBB dan Pendapatan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 93.240.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 67.504.000,- (72,40%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya Peningkatan Kinerja Tim Intensifikasi PBB dan Pendapatan Daerah (10 kali), dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah.
5. Kegiatan Inventarisasi dan Sinkronisasi Data Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru, DAK dan DBH dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 84.110.700,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 78.609.300,- (93,46%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Inventarisasi dan Sinkronisasi Data Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru, DAK dan DBH, dengan capaian kinerja berupa Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran DAU, DAK dan DBH dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 213.814.020,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 198.536.700,- (92,85%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya - Data realisasi tunjangan profesi guru (4 triwulan), Data realisasi tambahan penghasilan guru (4 triwulan), Data realisasi tunjangan khusus guru (4 triwulan), Data realisasi DAU

(2 Semester), Data realisasi DAK (2 Semester), Data realisasi DBH (2 Semester), dengan capaian kinerja berupa Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

7. Kegiatan Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai Kabupaten Lima Puluh Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 84.586.990,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 82.027.000,- (96,97%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai Kabupaten Lima Puluh Kota (12 Bulan), dengan capaian kinerja berupa Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Kegiatan Pembinaan dan Penertiban Pajak Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.399.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 29.348.000,- (59,41%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pembinaan dan Penertiban Pajak Daerah (8 Kali), dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah..
9. Kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 51.690.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 43.994.235,- (85,11%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pemeriksaan Pajak Daerah (5 dokumen), dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah.
10. Kegiatan Bimbingan Teknis Pajak Daerah untuk Kolektor PBB Nagari dan Jorong dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29.420.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 25.413.000,- (86,38%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Bimbingan Teknis Pajak Daerah untuk Kolektor PBB Nagari dan Jorong (6 kali bimtek), dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah.

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

Pada Tahun 2019 program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :

Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sasaran Tersediannya tenaga ahli, dan analisis system, mikrotik, routerboard CCR1036-12G-44S-EM, Laptop dan terlaksananya Bimtek sebanyak 1 kali, Terintegrasinya Sistem Aset dari SIMDA ke SIPKD untuk tahun 2019. Sedangkan hasil kegiatan pada tahun 2019 yang melebihi target dari target yang ditetapkan semula adalah dari belanja jasa tenaga ahli yang telah menghasilkan beberapa keluaran yaitu :

1. Tersusunnya Aplikasi SISPEKS yaitu aplikasi sebagai mobitoring pelaksanaan kegiatan bagi eksekutif.
2. Tersusunnya Aplikasi SP2D Online yaitu aplikasi yang mengambil data dari SIPKD ke aplikasinya Bank Nagari.
3. Terintegrasinya Sistem Aset dari SIMDA ke SIPKD.
4. Terlaksananya penggunaan SIPKD, SIM Gaji secara online dengan melakukan pembukaan Subdomain bagi aplikasi tersebut.

2.1.4 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya Atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan urusan Keuangan terlaksana dengan baik, Alokasi anggaran dan realiasi keuangan/fisik kegiatan dapat tercapai 100%. Kegiatan yang melebihi target adalah karena kegiatan tersebut termasuk kedalam Kegiatan Inovasi Badan Keuangan.

Hasil evaluasi selanjutnya yaitu terhadap renstra Badan Keuangan sampai dengan triwulan II Tahun 2020. Anggaran Badan Keuangan yang semula sebesar Rp. 10.653.688.148,- karena pengaruh COVID-19 terjadi refocusing anggaran sehingga menjadi Rp. 6.360.854.620,-. Sehingga Program/Kegiatan Badan Keuangan yang semula sebanyak 5 program 64 kegiatan setelah dilakukan refocusing anggaran menjadi 5 program 57 kegiatan. Berikut

dijelaskan tingkat pencapaian target dan realisasi program dan kegiatan sebagai berikut

- A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar 59,20 %. Tingkat pencapaian sesuai dengan target Renstra hingga tahun 2020 adalah sebesar 10 % sehingga tingkat pencapaiannya telah mencapai 70 %
- B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar 42,37 %, Tingkat pencapaian sesuai dengan target Renstra hingga tahun 2020 adalah sebesar 10 % sehingga tingkat pencapaiannya telah mencapai 70 %
- C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar 0 %, Tingkat pencapaian sesuai dengan target Renstra hingga tahun 2020 adalah sebesar 0 % sehingga tingkat pencapaiannya telah mencapai 40 %
- D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar 18,21 %, Tingkat pencapaian sesuai dengan target Renstra hingga tahun 2020 adalah sebesar 15 % sehingga tingkat pencapaiannya telah mencapai 75 %
- E. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar 38,15 %, Tingkat pencapaian sesuai dengan target Renstra hingga tahun 2020 adalah sebesar 15 % sehingga tingkat pencapaiannya telah mencapai 65 %
- F. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota, dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar 35,97 %, Tingkat pencapaian sesuai dengan target Renstra hingga tahun 2020 adalah sebesar 8 % sehingga tingkat pencapaiannya telah mencapai 68 %.

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Badan Keuangan tahun 2019-2020 dan pencapaian kinerja Renstra Badan Keuangan, maka rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Pencapaian Renstra Badan Keuangan sampai dengan Tahun 2020 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Pencapaian Renstra Badan Keuangan s/d Tahun 2020
Kabupaten Lima Puluh Kota

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (akhir periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keuangan s/d Tahun 2019	Target Kinerja Renja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Program dan Keuangan Kegiatan s/d Triwulan IV tahun 2019		Capaian Target Renja s/d Triwulan IV Tahun 2020		KET
					Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10=(9/4)	17
Wajib									
Ownerni daerah, Pem. Jumi, Adm. keu, Perangkat daerah dan Persandian									
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran								
Penyediaan jasa surat menyurat	Terkinernya surat dan dokumen administrasi perkantoran	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tertibnya rekening telepon, listrik, air dan internet	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terselenggaranya administrasi keuangan	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	
Penyediaan ATK	Terpenihnya ATK	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	
Penyediaan barang untuk pengunduan	Terpenihnya barang cetakan dan pengandaan kejurusan kanting	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan ktr	Tersedianya alat listrik dan instalasi listrik yang baik	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	
Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	

Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan bacaan dan peraturan perundangan	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%
Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan tamu, rapat dan pegawai	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran							
Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%
Pengadaan meubelur	Tersedianya laptop, printer, infocus dan peralatan kantor lainnya	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Tersedianya Barang-barang meubelur kantor	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%
Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas	Tersedianya gedung kantor DPPKAD	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%
Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya secara berkala kendaraan dinas/operasional	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%
Pembuatan Taman di Halaman Gedung	Tersedianya secara berkala peralatan gedung kantor	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%
Program : Peningkatan Disiplin Aparatur								
Pengadaan pakaian dinas	Tersedianya Pembuatan Tempat Parkir, Taman/Taping Blok dan Uam Bagian Belakang	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
Simulasi implementasi peraturan perundang-undangan	Tingkat disiplin aparatur							
Sosialisasi peraturan Perundang-undangan	terpenuhinya pakaian dinas pegawai DPPKAD	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%
Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Simulasi uji pengeluaran keuangan	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%
	Tersedianya sosialisasi peraturan perundang-undangan	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%
	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan							
	Tersedianya Laporan capaian fisik dan keuangan, Lokio, Penetapan Kinerja	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran: Perda, Laporan bulanan penerimaan, Laporan bulanan pengeluaran	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Renstra, Renja, RKA, DPA, DPPA DPPKAD, RKA, DPA, DPPA PKPD, Prognosis Keuangan	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%
Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	100%	90%	20%	20%	100%	100%	20%
Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkannya kualitas pengelolaan keuangan daerah							
Penyusunan Analisa standar Belanja	Tersusunnya Dokumen Analisa Standar Belanja	100%	90%	20%	20%	100%	100%	20%
Penyusunan Standar Satuan Harga	Tersusunnya Buku pedoman daftar harga satuan barang dan standar biaya	100%	90%	20%	20%	100%	100%	20%
Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersusunnya Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	100%	90%	20%	20%	100%	100%	20%
Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%
Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD	Tersusunnya Perda tentang APBD	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%
Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh tentang APBD	Tersusunnya Peraturan Kdh tentang penyusunan APBD	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%
Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD	Tersusunnya Perda tentang Perubahan APBD	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%
Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh tentang Perubahan APBD	Tersusunnya Peraturan Kdh tentang perubahan APBD	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Rancangan peraturan Kdh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%
Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Rancangan peraturan Kdh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%
Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Terlaksananya Sistem informasi keuangan daerah	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%
Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%

Perbaikan Manajemen Aset/Barang Daerah	terlaksananya penghapusan barang daerah, tersusunya buku daftar kebutuhan barang. terlaksananya himtek pengelolaan barang milik daerah, terlaksananya pemutakhiran data dan labeling barang daerah	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%
Peningkatan Manajemen Investasi Daerah	Tersusunnya Pedoman dan kebijakan investasi daerah	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah	Tercapainya target penerimaan daerah	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%
Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB dan Pendapatan Lain-lain	Tercapainya realisasi PBB dan pendapatan lainnya	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%
Penyusunan standarisasi sarana dan prasarana	Tersusunnya Perbup tentang Pedoman dan Tata Cara pemakaian sarana dan prasarana barang daerah	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Dokumen pelaksanaan perubahan APBD	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Dokumen pelaksanaan APBD	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%
Rekonsiliasi Data Akuntansi	Tersedianya Data keuangan yang akuntabel	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%
Pemutakhiran data aset daerah	Terlaksananya laporan keuangan daerah dan inventarisasi data-data serta sosialisasi pengelolaan BMD	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%
Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah	Terlaksananya sistem informasi manajemen aset daerah yang akuntabel	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%
Penyusunan perencanaan barang milik daerah	tersusunnya buku RKEMD, RKPBMD, DKBMD dan DKBMD sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 Ttg Penetapan Status Pengguna BMD	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%
Penetapan pajak dan retribusi	erlaksananya pemungutan pajak dan retribusi daerah	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%
Koordinasi dan optimalisasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah	terciptanya jenis penerimaan daerah	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%
Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Sishop	erlaksananya program dan pengembangan aplikasi	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%
Monitoring dan rekonsiliasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak	Terlaksananya data potensi bagi hasil pajak dan bukan pajak	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%
Pendataan, Pemutakhiran dan pengembangan data potensi pajak dan retribusi	Terlaksananya data 2 pilk dan retribusi akurat & lengkap shg memudahkan utk pemungutan	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%
Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang pendapatan daerah (penghasilan)	Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan KDH tentang pendapatan daerah	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%
Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah	Terlaksananya pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%

Penyusunan regulasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah	Terlaksananya penyusunan peraturan daerah/ tanperbur pajak dan retribusi	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	20%
Monitoring dan evaluasi pendapatan daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	20%
Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan daerah 2018, terlaksananya penyempalan laporan keuangan daerah, terlaksananya konsultasi tentang penyusunan laporan keuangan	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	20%
Penyusunan KUA dan PPAS	terusutnya KUA dan PPAS tahun anggaran 2019 dan KUA -P dan PPAS-P Tahun Anggaran 2018	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	20%
Penyusunan Rancangan Kebutuhan Anggaran Daerah	terusutnya SE pedoman penyusunan RKA, Perbur dan SK	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	20%
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota	perencanaan dinas, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	20%
Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penatausahaan keuangan, pemerintah kabupaten lima puluh kota	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	20%
Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya tim anggaran pemerintah daerah	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	20%
Penyuluhan Pajak Daerah	Aparatur pemerintahan nagan dan wajib pajak paham tentang pajak daerah	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	20%
Fasilitasi Peningkatan Kinerja Tim Intensifikasi PBB dan Pendapatan Daerah	Terfasilitasinya tim intensifikasi dan ekstensifikasi PBB dan pendapatan lainnya	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	20%
Inventarisasi dan Sinkronisasi Data Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru	Terperuhnya permintaan data tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, DAK dan DBH	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	20%
Rekamitansi dan Penyusunan Laporan Realisasi Pemerintahan dan Pengeluaran DAU, DAK dan DBH	tersedianya laporan realisasi pemerintahan dan pengeluaran untuk Penda dan Pemerintah Pusat	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	20%
Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai Kabupaten Lima Puluh Kota	Tersedianya data gaji PNSD pegawai Kabupaten Lima Puluh Kota, tersedianya data potongan	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	20%
Pembinaan dan penerbitan pajak daerah	terselenggarakannya pembinaan dan penerbitan pajak daerah	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	20%
Pemeriksaan Pajak Daerah	Terlaksananya pemeriksaan pajak daerah	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	20%
Bimbingan Teknis Pajak Daerah Untuk Kolektor PBB Nagan dan Iorog	Kolektor PBB di Nagan dan Iorog paham dan mengerti tentang PBB	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	20%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan sebagai salah satu OPD dalam lingkup Kabupaten Lima Puluh Kota, serta ditentukan pula dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Badan Keuangan sudah menyusun dan mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, sehingga perlu dijelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan tersebut sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan.

Dasar hukum pembentukan Badan Keuangan adalah Peraturan Daerah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan tugas pokok Badan Keuangan diatur menurut Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dengan Fungsi Antara lain :

- a. Perumusan teknis dibidang Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Perumusan teknis dibidang Penagihan, Pembinaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
- c. Perumusan teknis dibidang Aset Daerah;
- d. Perumusan teknis dibidang Anggaran;
- e. Perumusan teknis dibidang Perbendaharaan;
- f. Perumusan teknis dibidang Akuntansi
- g. Pelaksana Administrasi badan; dan
- h. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas

Pencapaian kinerja Badan Keuangan pada tahun 2021 disajikan dalam tabel Pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan kinerja sebagai berikut:

Tabel T.C.30

PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEPALA BADAN KEUANGAN

No.	Sasaran	Indikator	Target Renstra OPD						Realisasi Capaian						Proyeksi		Catatan Analisis
(1)	(2)	(3)	2017 (4)	2018 (5)	2019 (6)	2020 (7)	2021 (8)	2016 (9)	2017 (10)	2018 (11)	2019 (12)	2020 (13)	2021 (14)	2022 (15)	(16)		
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	OPINI BPK Ternacap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		WTP	WTP			
		Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	1:0,05	1:0,06	1:0,07	1:0,08	1:0,09	1:0,07	1:0,08	1:0,06	1:0,06	-	1:0,08	1:0,09	-		
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan OPD Pengelolaan Keuangan Daerah dan Arsip	Skor KKM Badan Keuangan	74,12	75,23	76,22	77,41	80		74,12	-	77,41	-	80	80	-		
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	60	60	63	66	70,69		60,06	60,58	63	-	70,69	70,69	-		

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Badan Keuangan terdiri atas dua (2) sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mempunyai 2 indikator :
 - a. Opini BPK terhadap LKPD
 - b. Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan OPD Pengelolaan Keuangan Daerah dan Arsip, yang mempunyai 2 indikator yaitu :
 - a. Skor IKM Badan Keuangan
 - b. Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan

Pada Tahun 2019, Kepala Badan Keuangan telah mencapai target IKU yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah 2016-2021. Sebanyak 60%.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan

Dengan penyelenggaraan program/kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Keuangan maka dampaknya terhadap kinerja pelayanan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Terciptanya pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam wujud laporan keuangan daerah

Tujuan dimaksud dikatakan tercapai apabila Laporan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota mendapat opini dari Badan Pemeriksa Keuangan berupa "Wajar Tanpa Pengecualian"

2. Meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah.
3. Terbitnya administrasi pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan, masih ditemukan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia Masih belum memadai.
2. Sarana dan Prasarana belum memadai.

3. Masih kurangnya aparatur untuk pendataan dan pemutakhiran pajak dan retribusi daerah sehingga belum akuratnya data menyebabkan tidak tergalinya potensi pajak dan retribusi daerah.
4. Besarnya rentang kendali pada Dinas Pendidikan menyebabkan proses verifikasi belum maksimal karena terbatasnya personil pengelola aset.

Pelaksanaan kegiatan secara umum telah dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun secara khusus menghadapi tantangan dan hambatan, diantaranya :

1. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan supaya didukung dengan pendanaan yang memadai sesuai Renja yang diajukan setiap tahunnya dari OPD, agar tidak terjadi pemotongan anggaran Program/Kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan yang direncanakan.
2. Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan disarankan atau diharapkan untuk mendukung pelaksanaan ke lapangan didukung oleh personil yang memadai sesuai dengan bidang teknis yang dibutuhkan.
3. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan pada Badan Keuangan hendaknya didukung oleh kantor/gedung yang memadai.

Sedangkan peluang yang dimiliki dan diperlukan untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan Badan Keuangan, antara lain :

1. Terlaksananya dengan baik dan lancar peninjauan lapangan terhadap permasalahan yang timbul memerlukan koordinasi.
2. Adanya/terselenggaranya forum komunikasi dalam bentuk rapat-rapat dalam memberikan dan mencari solusi-solusi dari permasalahan yang ada dengan cara pendekatan dan koordinasi sehingga peran serta instansi vertikal dapat memberikan masukan yang berarti bagi Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Motor penggerak program/kegiatan Badan Keuangan dan Motivator bagi pelaksanaan prosedur ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan kewenangan.
4. Dana yang tersedia.

5. Sambutan yang baik dan kooperatif dari stakeholder.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Keuangan dirumuskan sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan berkelanjutan oleh masing-masing unit kerja
2. Menambah Pegawai yang mengerti dengan jaringan
3. Melakukan Rekon Laporan Keuangan Tepat Waktu
4. Penambahan sarana/ peralatan pendukung
5. Pelatihan bagi pengguna SIPKD
6. Melakukan Rekon Aset Tepat Waktu
7. Menambah sarana/ peralatan pendukung
8. Upgrade frekwensi
9. Membentuk Regulasi Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-undangan (Perda)
10. Selalu Melakukan Kajian dan Telaahan Terhadap Peraturan Perundang- Undangan
11. Melakukan Monitoring dan Identifikasi terhadap objek Pajak dan Retribusi Yang Baru
12. Melakukan Evaluasi, pendataan barang secara berkala
13. Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi Bagi Pengurus Barang
14. Pelaksanaan rekon antara Bidang aset dan para pengurus barang
15. Pemantauan atas pencatatan aset

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Bab ini berisikan uraian mengenai perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Dijelaskan juga mengenai alasan proses tersebut dilakukan serta penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namu besarannya berbeda.

Adapun hasil perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang tertuang dalam renja Badan Keuangan sebagai berikut :

1. Jumlah Program dan Kegiatan Badan Keuangan yang tertuang pada Rancangan Awal RKPD dengan kebutuhan yang tertuang pada renja Badan Keuangan adalah 7 Program dan 68 Kegiatan, akan tetapi berdasarkan hasil analisis kebutuhan pada tahun 2021 jumlah kegiatan dikurangi satu kegiatan. Kegiatan yang dikurangi sesuai dengan kebutuhan yaitu kegiatan Pembuatan Taman di Halaman Gedung. Kegiatan ini dihilangkan untuk pemenuhan target kebutuhan kegiatan yang lebih mendesak lainnya.
2. Pengurangan pagu kegiatan sehingga target kegiatan juga dikurangi, ini terjadi karena adanya pengurangan pagu dana untuk Badan Keuangan.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021 disajikan dalam tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Badan Keuangan sebagai berikut:

No	KEMENTERIAN AGAMA RI					KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN KEMAHANTRULAN				
	Kategori / Kegiatan	Lokasi	Indikator Pencapaian Program/Proyek	Tingkat Capaian	Masa Realisasi	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Pencapaian	Tingkat Capaian	Kebutuhan Dana
1	01	01	Program : Pembangunan Kantor dan Fasilitas	70,00	2020-2021	Program : Pembangunan Kantor dan Fasilitas	70,00	2020-2021	70,00	227.584.333
1	01	02	Pengadaan Perabotan Kantor dan Fasilitas	70,00	2020-2021	Pengadaan Perabotan Kantor dan Fasilitas	70,00	2020-2021	70,00	375.656.660
1	01	03	Pengadaan Perabotan Kantor dan Fasilitas	70,00	2020-2021	Pengadaan Perabotan Kantor dan Fasilitas	70,00	2020-2021	70,00	220.000.000
1	01	04	Pengadaan Perabotan Kantor dan Fasilitas	70,00	2020-2021	Pengadaan Perabotan Kantor dan Fasilitas	70,00	2020-2021	70,00	220.000.000
1	01	05	Pengadaan Perabotan Kantor dan Fasilitas	70,00	2020-2021	Pengadaan Perabotan Kantor dan Fasilitas	70,00	2020-2021	70,00	220.000.000
1	01	06	Pengadaan Perabotan Kantor dan Fasilitas	70,00	2020-2021	Pengadaan Perabotan Kantor dan Fasilitas	70,00	2020-2021	70,00	220.000.000
1	01	07	Pengadaan Perabotan Kantor dan Fasilitas	70,00	2020-2021	Pengadaan Perabotan Kantor dan Fasilitas	70,00	2020-2021	70,00	220.000.000
1	01	08	Pengadaan Perabotan Kantor dan Fasilitas	70,00	2020-2021	Pengadaan Perabotan Kantor dan Fasilitas	70,00	2020-2021	70,00	220.000.000
1	01	09	Pengadaan Perabotan Kantor dan Fasilitas	70,00	2020-2021	Pengadaan Perabotan Kantor dan Fasilitas	70,00	2020-2021	70,00	220.000.000
1	01	10	Pengadaan Perabotan Kantor dan Fasilitas	70,00	2020-2021	Pengadaan Perabotan Kantor dan Fasilitas	70,00	2020-2021	70,00	220.000.000
1	01	11	Pengadaan Perabotan Kantor dan Fasilitas	70,00	2020-2021	Pengadaan Perabotan Kantor dan Fasilitas	70,00	2020-2021	70,00	220.000.000
1	01	12	Pengadaan Perabotan Kantor dan Fasilitas	70,00	2020-2021	Pengadaan Perabotan Kantor dan Fasilitas	70,00	2020-2021	70,00	220.000.000
1	01	13	Pengadaan Perabotan Kantor dan Fasilitas	70,00	2020-2021	Pengadaan Perabotan Kantor dan Fasilitas	70,00	2020-2021	70,00	220.000.000
1	01	14	Pengadaan Perabotan Kantor dan Fasilitas	70,00	2020-2021	Pengadaan Perabotan Kantor dan Fasilitas	70,00	2020-2021	70,00	220.000.000
1	01	15	Pengadaan Perabotan Kantor dan Fasilitas	70,00	2020-2021	Pengadaan Perabotan Kantor dan Fasilitas	70,00	2020-2021	70,00	220.000.000
1	01	16	Pengadaan Perabotan Kantor dan Fasilitas	70,00	2020-2021	Pengadaan Perabotan Kantor dan Fasilitas	70,00	2020-2021	70,00	220.000.000
1	01	17	Pengadaan Perabotan Kantor dan Fasilitas	70,00	2020-2021	Pengadaan Perabotan Kantor dan Fasilitas	70,00	2020-2021	70,00	220.000.000
1	01	18	Pengadaan Perabotan Kantor dan Fasilitas	70,00	2020-2021	Pengadaan Perabotan Kantor dan Fasilitas	70,00	2020-2021	70,00	220.000.000
1	01	19	Pengadaan Perabotan Kantor dan Fasilitas	70,00	2020-2021	Pengadaan Perabotan Kantor dan Fasilitas	70,00	2020-2021	70,00	220.000.000
1	01	20	Pengadaan Perabotan Kantor dan Fasilitas	70,00	2020-2021	Pengadaan Perabotan Kantor dan Fasilitas	70,00	2020-2021	70,00	220.000.000

[illegible]

[illegible]

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah. Salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena hakekatnya masyarakat yang menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Untuk Tahun 2021 Badan Keuangan tidak dapat memasukkan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat kedalam renja Badan Keuangan karena usulan yang dimasukkan bukan merupakan kewenangan Badan Keuangan, program kegiatan yang diusulkan tersebut yaitu :

TABEL 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI
PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2021

NO	PROGRAM KEGIATAN	NAMA PEKERJAAN/ USULAN	VOLUME	LOKASI
1		Bantuan IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia)	1 Paket	Kabupaten Lima Puluh Kota
2	Pemberian Bantuan Beasiswa	Beasiswa	250 Orang	Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kec. Luak dan Kec. Situjuah Limo Nagari
3	Bantuan Hibah untuk tempat ibadah	Hibah untuk masjid dan mushalla	30 Tempat Ibadah	Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kec. Luak dan Kec. Situjuah Limo Nagari

4	Bantuan hibah untuk yayasan atau TK/PAUD/MI/MDA	Hibah untuk yayasan, TK/PAUD/MI/MDA	5 Objek Penerima	Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kec. Luak dan Kec. Situjuh Limo Nagari
5	Pemberian Bantuan Beasiswa	Beasiswa	300 Orang	Kec. Mungka, Guguak dan Akabiluru
6	Bantuan Hibah untuk tempat ibadah	Hibah untuk masjid dan mushalla	30 Tempat Ibadah	Kec. Mungka, Guguak dan Akabiluru
7	Bantuan hibah untuk yayasan atau TK/PAUD/MI/MDA	Hibah untuk yayasan, TK/PAUD/MI/MDA	6 Objek Penerima	Kec. Mungka, Guguak dan Akabiluru
8	Pemberian Bantuan Beasiswa	Beasiswa	50 Orang	Kec. Bukik Barisan
9	Bantuan Hibah untuk tempat ibadah	Hibah untuk masjid dan mushalla	20 Tempat Ibadah	Kec. Bukik Barisan dan Kec. Gunuang Omeh
10	Bantuan hibah untuk yayasan atau TK/PAUD/MI/MDA	Hibah untuk yayasan, TK/PAUD/MI/MDA	7 Objek Penerima	Kec. Bukik Barisan
11	Bantuan Modal Usaha	Bantuan modal usaha irik petelur "HPM Farm" an Harpin Putra Marshendra	1	Jorong Indobaleh Barat Nagari Mungo
12		Bantuan Modal Usaha rendang kacang "Jasa Ibu" an. Maiharti	1	Jorong Indobaleh Barat Nagari Mungo
13	Bantuan Masjid	Pembangunan masjid 'Jamiatul Huda'	1	Jorong Indobaleh Barat Nagari Mungo
14		Pembangunan Surau "Al-Ikhlas" Batu Nan Gadang	1	Jorong Indobaleh Barat Nagari Mungo
15		Bantuan Pembangunan Surau "Suluk Situak"	1	Jorong Bukik Gombak Situak Nagari Mungo
16		Bantuan pembangunan masjid "Baitul Ikhlas" Koto Bakuruang	1	Jorong Koto Bakuruang Nagari Mungo

17		Bantuan Pembangunan Mushalla Darul Ikhsan Pincuran Tinggi	1	Anduriang Pincuran Tinggi Nagari Mungo Kec. Luak
18		Bantuan Pembangunan Surau "Mutmainnah" Pincuran Tinggi	1	Pincuran Tinggi Nagari Mungo Kec. Luak
19		Bantuan Pembangunan TPA "Ansyarullah" Pincuran Tinggi	1	Pincuran Tinggi Nagari Mungo Kec. Luak
20		Bantuan Pembangunan Masjid "Wushta" Pincuran Tinggi	1	Pincuran Tinggi Nagari Mungo Kec. Luak
21	Fasilitasi Pengembangan Usaha UKM	Hibah Modal Usaha		Kelompok wanita Sejahtera Nagari Simalanggang
22		Bansos Modal Usaha		5 Orang Nagari Simalanggang
				An. Oyong Liza Jor. Koto Nag. Simalanggang
				An. Rahmadianis Jor. Koto Nag. Simalanggang
				An. Nag. Simalanggang
				An. Rahma Yana Jor. Koto Nag. Simalanggang
				An. Yosma rtiti Jor. Koto Nag. Simalanggang

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2021 sebagaimana arahan Presiden terkait penyusunan RKP tahun 2021 memuat tentang tema RKP tahun 2021 adalah :

"mempercepat pemulihan ekonomi dan formasi sosial dengan fokus pada pemulihan industri pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaringan pengaman sosial dan reformasi sistem ketahanan bencana"

Prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2016-2021 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita yaitu :

- Cita 1 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
- Cita 2 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya:
- Cita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- Cita 4 : Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi bermartabat dan terpercaya
- Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
- Cita 6 : Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional
- Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik

Cita 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa dan;

Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat untuk mendukung tema RKP Nasional tahun 2021 ini antara lain :

1. Anggaran negara harus berorientasi mamfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional
2. Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function tetapi moner program prioritas. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (fusi) harus dibiayai secara merata
3. Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada mamfaatnya bagi rakyat. Semua nomenklatur proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih dan seterusnya.

Pendekatan Pembangunan yang akan dilaksanakan adalah Holistik, Tematik, Terintegritas, dan Spasial.

- **Holistik- Tematik.** Untuk mencapai sasaran prioritas nasional Kedaulatan Pangan, perlu koordinasi multi kementerian, yaitu antara lain Kementan, KemenPUPR, Kemen ATR, dan Kemen KLH, Kemen Perdagangan serta Pemerintah Daerah.
- **Integratif.** Pencapaian Kedaulatan Pangan perlu dilakukan secara integrasi melalui peningkatan produktifitas laha existing, menyetop konversi lahan produktif reforma agraria, pencetakan sawah baru, pengembangan pertanian organik, pengendalian harga dan inport pangan dan seterusnya (kombinasi berbagai program/kegiatan)
- **Spasial.** Pembangunan sawah baru misalnya, harus mempertimbangkan lokasi, berdekatan dengan irigasi, terintegrasidengan jalan, gudang, pasar, dan lain-lain

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Keuangan lain adalah :

1. Meningkatkan sarana teknologi Informasi yang tepat untuk membantu proses penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.
2. Meningkatkan prasarana dan sarana penunjang pengelolaan keuangan daerah.
3. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah.
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan, pengelolaan asset dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah
5. Meningkatkan kepatuhan aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah
6. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi

Selanjutnya Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan Badan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas sistem teknologi informasi untuk percepatan proses penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
2. Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana penunjang pengelolaan keuangan daerah yang memadai.
3. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah
4. Terwujudnya pengelolaan asset daerah secara profesional
5. Terwujudnya penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah yang cepat, tepat dan akurat
6. Terwujudnya pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan dan akuntabel

Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Cara yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah melalui arah kebijakan umum berikut :

1. Peningkatan dan optimalisasi Sumber-sumber Penerimaan Daerah.
2. Pemantapan alokasi dan distribusi anggaran pemerintah daerah dan nagari dengan prioritas dan sesuai kemampuan daerah.
3. Pengembangan sistem dan pengelolaan keuangan daerah.
4. Peningkatan penerapan musrenbang sebagai landasan utama perencanaan pembangunan daerah.
5. Peningkatan administrasi dan pengendalian perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
6. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran di atas, maka diperlukan strategi sebagai berikut :

1. Menyempurnakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan yang sudah ada
2. Meningkatkan SDM pengelola keuangan pada SKPD, melalui diklat, bimbingan teknis, workshop maupun training-training khusus lainnya.
3. Menyiapkan database pendapatan daerah, database asset daerah dan petunjuk teknis pelaksanaan APBD
4. Memberikan reward and punishment.

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu pembangunan Sumatera Barat juga sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan di Kabupaten lima Puluh Kota. Untuk itu Pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota harus bisa disinkronkan dengan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penyusunan Renja ini Badan Keuangan perlu melakukan telaahan terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Disamping mengacu dan mempedomani proyeksi indikator kinerja makro daerah Sumatera Barat tersebut, dalam penyusunan Renja Badan Keuangan juga memperhatikan isu-isu strategis yang dimuat dalam Background Study RPJMD tersebut. Adapun isu-isu strategis adalah :

1. Ekonomi :

Ketimpangan pendapatan tinggi, pendapatan perkapita rendah, pengangguran tinggi, inflasi tinggi, kemiskinan tinggi

2. Keuangan Daerah :

Kinerja pemerintah dalam capaian PAD masih rendah, sinkronisasi antara belanja dan perencanaan belum sesuai dengan kebutuhan riil daerah

3. Pertanian :

Penguatan pembangunan pertanian berkelanjutan

4. Iklim Investasi Kondusif

Rendahnya kapasitas listrik, masalah pembebasan lahan, regulasi pendukung belum optimal, aksesibilitas transportasi rendah, resiko bencana relatif tinggi

5. Pendidikan :

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan

6. Kesehatan :

Angka kematian Ibu dan Bayi masih tinggi

7. Pemberdayaan Perempuan :

Keadilan dan kesetaraan Gender serta perlindungan Perempuan, Anak dan Lansia.

8. Permasalahan Sosial :

Kepemilikan lahan, keamanan, peningkatan SDM Aparatur Sipil Negara, Pembangunan berbasis nagari dan kebencanaan

9. Agama :

Belum adanya Perda yang mendukung kualitas hidup beragama

10. Transportasi :

Peningkatan Aksesibilitas sarana dan prasarana transportasi, pelayanan

transportasi publik belum optimal, tingkat kecelakaan lalu lintas masih tinggi.

Oleh karena itu rencana kerja disusun oleh Badan Keuangan mesti disinkronkan dan dapat mendukung pencapaian prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat.

3.3. Program dan Kegiatan (di tahun 2021 dalam Renstra)

Dengan dilantikannya Bupati terpilih pada tanggal 17 Februari 2016 maka kebijakan yang akan dituangkan dalam Renja badan Keuangan mengacu kepada Visi Misi Bupati Terpilih Kabupaten Lima Puluh Kota walaupun. Visi Kabupaten Lima Puluh Kota adalah **"Mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis 'Yang Mantap' Berlandaskan Iman dan Taqwa"**.

Sejahtera : diukur dari tingkat dan kemajuan daerah kearah yang tercermin dari indeks pendidikan, kesejahteraan daya beli, PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi

Dinamis : diukur dari perkembangan dan kemajuan daerah kearah yang lebih baik dari tahun ketahun, terutama yang berkaitan dengan semakin berkurangnya angka pengangguran dan penduduk miskin, meningkatnya laju investasi, serta bertambah baiknya kondisi ekonomi makro

Mantap : Maju, Amanah, Bermatabat, dan Berpendidikan

Iman dan Taqwa : diukur dari semakin baiknya etika dan moral masyarakat berdasarkan norma agama, norma hukum, norma adat dan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, yang tercermin pula dari kualitas kehidupan beragama serta kerukunan diantara umat beragama dan semakin kokohnya pelaksanaan filosofi " Adat bersendi Syarak, Syarak bersendi Kitabullah".

Adapun misi sebagai penjabaran visi tersebut sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian masyarakat berbasis pemanfaatan potensi daerah, peningkatan manajemen pengelolaan komoditas unggulan dan andalan serta pengembangan produktifitas bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan sumber daya alam lainnya, dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan.
2. Peningkatan perluasan lapangan kerja dan pemberantasan pengangguran melalui Gerakan Ekonomi Kerakyatan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Gerakan usaha dini mandiri, serta gerakan pemberdayaan perempuan, Gerakan Sayang Jumo. Bank Tanah Nagari
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan secara murah dan bermutu, serta meningkatkan pemberdayaan Surau dan pondok pesantren sebagai salah satu soko guru peningkatan sumber daya manusia
4. Peningkatan pelayanan publik dan Penciptaan iklim investasi yang didukung oleh optimalisasi pelayanan infra struktur daerah serta peningkatan kinerja pemerintah daerah berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
5. Jaminan Penjenjangan karir dan kesejahteraan PNS dan Perangkat Nagari
6. Peningkatan pembangunan berbasis jorong melalui revitalisasi pemerintahan dan lembaga-lembaga Nagari, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi nagari dan lumbung padi nagari sesuai dengan karakteristik potensi lokal
7. Meningkatkan kehidupan beragama yang berorientasi pada kualitas peribadatan dan kerukunan antar umat beragama
8. Mewujudkan keberadaan kota Sarilamak sebagai pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi

Ringkasan Program dan Kegiatan Badan Keuangan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 3.1

Program dan kegiatan yang ada pada setiap OPD

No	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan 4. Penyediaan alat tulis kantor 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6. Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 8. Penyediaan peralatan rumah tangga 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10. Penyediaan makanan dan minuman 11. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 2. Pengadaan peralatan gedung kantor 3. Pengadaan mebeleur 4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 6. Pemeliharaan berkala/ peralatan gedung kantor 7. Pembuatan Taman di Halaman Kantor
3.	Peningkatan disiplin aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan.

5.	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
		1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
JML	5 Program	25 Kegiatan

Tabel 3.2

Program dan Kegiatan lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah

No	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Peningkatan peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1. Penyusunan analisa standar belanja 2. Penyusunan standar satuan harga 3. Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah 4. Penyusunan sisdur pengelolaan keuangan daerah 5. Penyusunan rancangan perda tentang APBD 6. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 7. Penyusunan rancangan perda tentang perubahan APBD 8. Penyusunan rancangan peraturan kdh tentang penjabaran perubahan APBD 9. Penyusunan rancangan perda ttg pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 10. Penyusunan rancangan perda kdh tentang penjabaran pertanggungjawaban

		<p>pelaksanaan APBD</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Penyusunan sistem informasi keuangan daerah 12. Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 13. Peningkatan manajemen aset/ barang daerah 14. Peningkatan manajemen Investasi daerah 15. Penyusunan Standarisasi Sarana dan Prasarana 16. Penyusunan dokumen pelaksanaan perubahan APBD 17. Penyusunan dokumen pelaksanaan APBD 18. Rekonsiliasi data akuntansi 19. Pemutakhiran data aset daerah 20. Sistem informasi manajemen aset daerah 21. Penyusunan perencanaan barang milik daerah 22. Penetapan pajak dan retribusi 23. Koordinasi dan optimalisasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah 24. Pengembangan dan pengelolaan aplikasi sismop 25. Monitoring dan rekonsiliasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak 26. Pendataan, pemutakhiran dan pengembangan data potensi pajak dan retribusi 27. Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang pendapatan daerah (penagihan 28. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi 29. Penyusunan regulasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah 30. Monitoring dan Evaluasi
--	--	--

		Pendapatan Daerah 31. Penyusunan laporan keuangan daerah 32. Penyusunan KUA dan PPAS 33. Penyusunan Rancangan Kebijakan Anggaran Daerah
JML	1 Program	33 Kegiatan

Tabel 3.3
Program dan Kegiatan Pembinaan pengelolaan Keuangan

No	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Program pembinaan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten / kota	1. Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten / kota 2. Fasilitasi tim anggaran pemerintah daerah 3. Penyuluhan pajak daerah 4. Fasilitasi peningkatan kinerja tim intensifikasi PBB dan pendapatan daerah 5. Inventarisasi dan sinkronisasi data tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, DAK dan DBH 6. Rekonsiliasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran DAU, DAK, DBH 7. Rekonsiliasi data belanja pegawai kabupaten Lima Puluh Kota 8. Pembinaan dan Penertiban Pajak daerah 9. Pemeriksaan pajak daerah 10. Bimbingan teknis pajak daerah untuk kolektor PBB, Nagari, dan Jorong
JML	1 Program	10 Kegiatan

Berdasarkan ketiga pengelompokan program tersebut maka untuk tahun 2021 Badan Keuangan melaksanakan 7 program dengan 67 kegiatan.

Program dan Kegiatan yang Ada Pada Setiap OPD
Sesuai Mendagri No. 90 Tahun 2019

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
1.1		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1.1.1.			Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
1.1.2.			Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
1.1.3.			Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
1.1.4.			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
1.1.5.			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.2.		Administrasi Keuangan	
1.2.1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.2.2			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.2.3			Penyusunan laporan keuangan Bulanan/Semesteran
1.2.4			Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
1.2.5			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.3.		Administrasi Umum	
1.3.1.			Penyediaan jasa surat menyurat
1.3.2.			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.3.3.			Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.3.4.			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.3.5.			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1.3.6.			Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.3.7.			Penyediaan barang cetakan

			dan penggandaan
1.3.8.			Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
1.3.9.			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.3.10.			Penyediaan peralatan rumah tangga
1.3.11.			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.3.12.			Penyediaan makanan dan minuman
1.3.13.			Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.3.14.			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.3.15.			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.3.16.			Pengadaan peralatan gedung kantor
1.3.17.			Pengadaan meubelur
1.3.18.			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.3.19.			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
1.3.20.			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.4.		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
1.4.1.			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.4.2.			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
1.4.3.			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Jml	1 Program	4 Kegiatan	33 Sub Kegiatan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.90 Tahun 2019 Program yang harus ada di Setiap OPD yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah , yang terdiri dari 1 Program dengan 4 Kegiatan serta 33 Sub Kegiatan.

**Program, Kegiatandan Sub Keglitan sesuai dengan
Urusan Pemerintahan Keuangan
Menurut Mendagri No. 90 Tahun 2019**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
1.1		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
1.1.1.			Penyusunan KUA dan PPAS
1.1.2.			Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
1.1.3.			Penyusunan dan Review DPA SKPD dan Perubahan DPA SKPD
1.1.4.			Penyusunan dan Review RKA SKPD dan Perubahan RKA SKPD
1.1.5.			Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
1.1.6.			Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
1.1.7.			Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD
1.1.8.			Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran
1.1.9.			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
1.1.10.			Koordinasi Daerah Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
1.1.11.			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
1.2.		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

1.2.1			Penatausahaan Pembiayaan Daerah
1.2.2			Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Transfer Lainnya
1.2.3			Pemrosesan, Lembar SP2D Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D
1.2.4			Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP
1.2.5			Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
1.2.6			Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
1.2.7			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait
1.2.8			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)
1.2.9			Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

1.3.		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
1.3.1.			Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
1.3.2.			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1.3.3.			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi
1.3.4.			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
1.3.5.			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA
1.3.6.			Penyusunan Tanggapan /Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1.3.7.			Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja serta Pembiayaan
1.3.8.			Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1.3.9.			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
1.3.10.			Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
1.3.11.			Verifikasi dan Pengujian atas Bukti Memorial

			Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
1.4.		Kegiatan Penunjang Urusan	
1.4.1.			Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus
2.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		
2.1.		Pengelolaan Barang Milik Daerah	
2.1.1.			Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang
2.1.2.			Koordinasi dan Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
2.1.3.			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
2.1.4.			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah
2.1.5.			Penatausahaan Barang Milik Daerah
2.1.6.			Inventarisasi Barang Milik Daerah
2.1.7.			Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah
2.1.8.			Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah
2.1.9.			Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

2.1.10.			Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
2.1.11.			Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan BMD
2.1.12.			Konsolidasi penyusunan laporan BMD dari SKPD
2.1.13.			Koordinasi dan Pembinaan Barang Milik Daerah
3.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		
3.1.		Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	
3.1.1.			Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
3.1.2.			Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3.1.3.			Perumusan Standarisasi Kebijakan Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3.1.4.			Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3.1.5.			Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat
3.1.6.			Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi
3.1.7.			Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi
3.1.8.			Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah

			dan Retribusi Daerah
3.1.9.			Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3.1.10.			Pemeriksaan Pajak Daerah
3.1.11.			Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Jml	3 Program	6 Kegiatan	56 Sub Kegiatan

Untuk Urusan Keuangan mengacu pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 Badan Keuangan pada tahun 2021 melaksanakan 3 Program 6 Kegiatan dan 56 Sub Kegiatan. Dan berdasarkan kedua pengelompokan tersebut Badan keuangan melaksanakan 4 Program, 10 Kegiatan dan 89 Sub Kegiatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Badan Keuangan ini disusun mengacu pada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor ... Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021, sementara itu Renja 2021 yang disusun juga harus mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Tahun 2016 – 2021.

Adapun mengenai uraian kegiatan berikut target kinerja dan indikasi anggaran program dan kegiatan Badan Keuangan Tahun 2021 secara lengkap dapat dilihat pada table berikut :

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN KEUANGAN

1997-2-27-28

[illegible]

MAJLIS PERANGKAT DAERAH : BADAN KEUANGAN

Number: 7 days 0

[illegible]

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN KEUANGAN

Lombardi & de la Torre

[illegible]

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.00 BADAN KEUANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.00 BADAN KEUANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan an Prioritas Pemban- gutan Nasional	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
5												
5 02									202,550,220,306	292,832,753,352		
5 02 01									29,853,060,995	34,331,020,144		
5 02 01 1									170,000,000	195,500,000		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH												
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
5 02 01 1 01	Penyusunan Rencana Renja Perangkat Daerah		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Serilamak	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Tersusunnya Renstra (1 dok), Renja (2 dok)	8 Dok	Tertaksarnya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11,500,000		
5 02 01 1 02	Penyusunan Program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Serilamak	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Tersusunnya RKA/DPA-BK (2 dok), RKA/DPA-BK (8 dok)	10 Dok	Tertaksarnya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15,000,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.00 BADAN KEUANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.00 BADAN KEUANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional		
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
5.02.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Penyusunan LAPJIP (1 dok), PK (1 dok), RKT (1 dok), IKU (1 dok), RAP (1 dok), LKIP (1 dok), LPPD (1 lbr), EKKP (1 dok), SIRUP (1 dok), SPJP (1 dok), SP (1 dok), Gender (4 dok), Laporan fisik tahunan badan keuangan (12 dok)	22 Dok	18 Dok	17,250,000			
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan (6 kali), Lemaga Khusus (arungan dan analisis sistem)	6 kali	18 Dok	132,250,000			
5.02.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Laporan fisik tahunan badan keuangan (12 dokumen)	12 Dok	18 Dok	17,250,000			
5.02.01.2.01.06	Administrasi Keuangan								26,870,559,440	30,901,143,356			
5.02.01.2.01.07	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	BKPS ANS Kab. Lima Puluh Kota, Tambahan Gaji PNS Tambahan	6400 Org 75 Org 75 Org	79,68	30,817,768,356			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.00 BADAN KEUANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.00 BADAN KEUANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
							Penghasilan, Baye Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Insentif Pajak dan Retribusi Daerah						
5.02.01.2.0.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Realisasi Kinerja SKPD		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Laporan capaian kinerja dan kualitas realisasi kinerja SKPD 4 dok	4 Dok	25.000.000	28.750.000			
5.02.01.2.0.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Semeste r		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1. laporan Keuangan Semester	13 Dok	25.000.000	28.750.000			
5.02.01.2.0.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Tersusunnya laporan semesteran prognosis ; 1 Dok	1 Dok	15.000.000	17.250.000			
5.02.01.2.0.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Laporan keuangan Badan Keuangan (1 buku)	1 Buku	7.500.000	8.625.000			
5.02.01.3	Administrasi Umum								2.227.501.555	2.561.626.788			
5.02.01.3.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan	100 %	Cek bank nagari Materai 3000 Materai 6000 Perangko biasa	45 Buah 2000 Buah 2092	20.000.000	23.000.000			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.00 BADAN KEUANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.00 BADAN KEUANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5.02.01.3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Sarilamak Daerah			Peningkatan kilat	Buah 182 Buah 250 Buah					
5.02.01.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Rakening air Rakening listrik Reserving telepon	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	Nilai akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	175.000.000	201.250.000		
5.02.01.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Administrasi keuangan, pelayanan belanja biaya barang, transfer nagan, santunan keuangan keihak lain	35 Dok	Nilai akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	250.000.000	287.500.000		
5.02.01.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Belanja jasa kebersihan kantor	1 Tahun	Nilai akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	175.000.000	201.250.000		
5.02.01.3	Penyediaan Alat tulis Kantor		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Alat tulis kantor	12 Bulan	Nilai akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	90.000.000	103.500.000		
5.02.01.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Cetak Penggandaan Pengiriman Publikasi	1 Tahun 250001 1 Tahun 1 Tahun	Nilai akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	125.000.000	143.750.000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.00 BADAN KEUANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.00 BADAN KEUANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan an Prioritas Pembangunan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5.02.01.2.0.3.12	Penyediaan Kebutuhan Instalasi Listrik/Penerangan dalam Bangunan Kantor		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Baterai jam dinding Baterai kecil Baterai laptop Bola lampu Charger laptop Fitting Kabel Sekam Stop kontak Terminal lampu	78 Buah 100 Buah 4 Buah 180 Buah 5 Buah 50 Buah 2 Rol 80 Buah 40 Buah 20 Buah	Nilai akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	70.69	35.000.000	40.250.000	
5.02.01.2.0.3.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Flash Disk Kursi Laci Meja Mouse Biasa Mouse Wireless Spanduk Struktur Organisasi Bendera	30 Buah 38 Buah 19 Buah 28 Buah 1 Bulan 2 Buah	Nilai akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	70.69	25.000.000	28.750.000	
5.02.01.2.0.3.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Bahan pembersih dan alat dapur	1 Paket	Nilai akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	70.69	25.000.000	28.750.000	
5.02.01.2.0.3.15	Penyediaan Bahan Barisan dan Peraturan Perundang-Undangan		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Koran harian Koran mingguan	24 Koran 23 Koran	Nilai akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	70.69	4.917.000	5.654.550	
5.02.01.2.0.3.17	Penyediaan Makanan dan		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Persentase pelaksanaan	100 %	Makanan harian Makanan rapat	1700 Porsi	Nilai akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	70.69	125.000.000	143.750.000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.00 BADAN KEUANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.00 BADAN KEUANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Majau (Rp.)	Keterangan ait Prioritas Pembang unan Nasional			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur		Target				Tolok Ukur		Target
					Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur		Target				Tolok Ukur		Target
	Minuman		pemerintahan	Kota, Harau, Sarilamak	penunjang urusan Pemerintahan Daerah		Makan tamu	2099 Porsi 5756 Porsi	Kawangan							
5 02 01 3 20 18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Buku SPMD	1 Tahun 1 Tahun	Nilai akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	250,000,000	287,500,000					
5 02 01 3 20 20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasion al		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kendaraan roda 2 Kendaraan roda 4	2 Unit 4 Unit	Nilai akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	275,625,000	315,368,750					
5 02 01 3 20 22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Spanduk	200 Meter	Nilai akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	10,000,000	11,500,000					
5 02 01 3 20 24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	AC Berdiri Bantal Laptop External Hardisk Hardisk Kalkulator Komputer PC Printer 5Chair Holding UPS	2 Unit 2 Buah 1 Buah 1 Buah 3 Buah 5 Unit 3 Unit 1 Buah 10 Unit	Nilai akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	100,000,000	115,000,000					
5 02 01 3 20 25	Pengadaan Meubelair		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau,	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan	100 %	Kursi rapat Lemari Arsip Meja 1/2 Biro Meja Meeting	14 Buah 4 Buah 2 Buah 1 Set	Nilai akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	100,000,000	115,000,000					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.00.31.00 BADAN KEUANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.00.31.00 BADAN KEUANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan dan Prioritas Pembang unan Nasional		
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur					Target	
					Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur					Target	
5 02 01 2.0 28 3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Belanja bahan material, belanja jasa pengamanan kantor, Pembelian Tanah	12 Bulan	Nilai akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	201.250.000					
5 02 01 2.0 30 3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Service dar satu rodang kendaraan roda 2 dan roda 4, BBM roda 2 dan roda 4, perpanjangan STNK	12 Bulan	Nilai akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	226.503.468					
5 02 01 2.0 34 3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Service pemeliharaan komputer, server, printer, genset, CCTV, WC, Faksimili, mesin tik, perforasi dan jaringan internet	12 Bulan	Nilai akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	60.500.000					
5 02 01 2.0 4 4	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										585.000.000	672.750.000			
5 02 01 2.0 02 4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Peningkatannya		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Pakaian dinas harian	106 Set	Skor IKM Badan Keuangan	69.000.000					
5 02 01 2.0 10 4	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Sosialisasi keuangan daerah	7 Kali	Skor IKM Badan Keuangan	86.250.000					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.00 BADAN KEUANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.00 BADAN KEUANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan an Prioritas Pembang unan Nasional	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
				Sarilamak	Daerah									
5 02 01 2 0 11 4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Bimbingan teknis dalam daerah Bimbingan teknis keuangan daerah, Bimbingan teknis luar daerah	6 kali 23 Kali	Skor IKM Badan Keuangan	80	450.000.000	517.500.000		
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH													
5 02 02 2 0 1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah													
5 02 02 2 0 01	Penyusunan KUA dan RPAS		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Opini BPK terhadap LKPD	1 WTP	1 KUA dan RPAS (2 dok 1 Z, Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah	2 Dok	WTP	1 Tahun	400.000.000	460.000.000		
5 02 02 2 0 02	Penyusunan Perubahan KUA dan Penyusunan PPAS		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Opini BPK terhadap LKPD	1 WTP	1 KUA-P dan PPAS-P 2 Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah	2 Dok	WTP	1 Tahun	400.000.000	460.000.000		
5 02 02 2 0 03	Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Opini BPK terhadap LKPD	1 WTP	Dokumen RKA SKPD Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah Perubahan RKA SKPD	46 Dok 46 Dok	WTP	1 Tahun	563.505.000	671.035.350		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.00 BADAN KEUANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.00 BADAN KEUANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Unsur Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan an Prioritas Pembang unan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 02 02 1 04	Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	Dokumen DPA SKPD	48 Dok	WTP	1 Tahun	65.000.000	74.750.000	
5 02 02 1 05	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	Facilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah Nota Keuangan APBD 2021 Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 2021 Perda APBD 2021 Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 2021 Rancangan Perda APBD 2021	1 Dok 300 Buku 1 Dok 300 Buku 1 Dok	WTP	1 Tahun	345.000.000	345.000.000	
5 02 02 1 06	Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan Perubahan APBD		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	Facilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah Nota Keuangan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Peraturan KDH tentang	70 Buku 60 Buku 300 Buku 50 Buku 300 Buku 150	WTP	1 Tahun	300.000.000	345.000.000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.00 BADAN KEUANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.00 BADAN KEUANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Target		Target		Target				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 02 02 1 07	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	Perbup Rancangan Raperbup	1 Duk 1 Duk	WTP	1 Tahun	20.000.000	23.000.000	
5 02 02 1 08	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Anggaran		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	1 Peraturan Bupati Analisis Standar Belanja 2 Peraturan Bupati Standar Biaya 2020 3. Perbup Hak Keuangan dan Administrasi Perencanaan dan Anggaran 4. Perbup Penjelasan Dinas 5. SK Perencanaan Dinas 6. Surat Keputusan Kode Rekening 7. SK	4 Duk 3 Duk 1 Duk	WTP	1 Tahun	200.000.000	230.000.000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.00 BADAN KEUANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.00 BADAN KEUANGAN

Kode	Unsur/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional		
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan							Hasil Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
5 02 02 2 09	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	Tunjangan Perumahan SE Pedoman Penyusunan RKA	2 Kali	WTP	1 Tahun	30.000.000	34.500.000			
5 02 02 2 10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja	4 Kali	WTP	1 Tahun	35.000.000	40.250.000			
5 02 02 2 11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pambayaran		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja	2 Kali	WTP	1 Tahun	20.000.000	23.000.000			
5 02 02 2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah										2.268.015,550	2.608.217,882			
5 02 02 2 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	Asistensi Singgaji MOJ lembaga perencana serta lembaga keuangan lainnya Sosialisasi tata kelola keuangan daerah Sosialisasi TNT Workshop pengelolaan	12 Bulan 2 Kali 3 Kali 3 Kali 2 Kali	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	1.699.114.000	1.943.497.700			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.00 BADAN KEUANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.00 BADAN KEUANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Praktikan Maju (Rp.)	Kebangan an Prioritas Pembang unan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
					Keuangan daerah								
5.02.00.2.02.00.02	Pengelolaan Pembayaran Daerah		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarimamak	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP		Opini BPK Terhadap LKPD	4 Dok 2 BUMD	1 WTP	26.350.000	30.302.500	
5.02.00.2.03.00.03	Koordinasi Pengelolaan Dana Pengelolaan dan Dana Transfer lainnya		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarimamak	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP		Opini BPK Terhadap LKPD	60 Dok	1 WTP	181.865.150	209.144.922	
5.02.00.2.04.00.04	Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Jenbar SP2D		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarimamak	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP		Opini BPK Terhadap LKPD	79 Nagari 79 Nagari	1 WTP	20.400.000	23.400.000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.00.31.00 BADAN KEUANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.00.31.00 BADAN KEUANGAN

Kode	Unsur/ Bidang Unsur Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
5.02.02.2.05	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SIM, Pembelian Pemeliharaan Rincian Penggunaan Atas Penghasilan SPI Gaji dan Non Gaji, Serta Penarikan SKPP		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	1. Rekonsiliasi data beasiswa pegawai 2 2. Rekonsiliasi SSBP 3. Rekonsiliasi JKK/JKM 4. 5. Rekonsiliasi RWP dan BPJS 5. 6. Rekonsiliasi kasda dengan Bank 6. 7. Rekonsiliasi DAU 8. Rekonsiliasi DAK 9. Rekonsiliasi DBH	32 Kali	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	100.017.125		
5.02.02.2.06	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Pemerintahan dan Pengukuran Kas Daerah, Laporan Aliran kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pe motongan dan Penyeroran Pembiayaan Pihak Ketiga (PFK)		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	1. Data realisasi tunjangan profesi guru 2. Data realisasi tunjangan guru 3. Data realisasi tunjangan insust guru 4. Data realisasi DAU 5. Data realisasi DAK 6. Data realisasi DBH	18 Dek	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	99.403.050		
5.02.02.2.07	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	1. Koordinasi Piutang dan Utang Daerah 3 (Catut Wuland 2. Dokumen Piutang	9 Kali	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	22.950.000	26.392.500	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.00 BADAN KEUANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.00 BADAN KEUANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikator (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan an Prioritas Pembang- unan Nasional	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
5.02.02.2.08	Militer Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Penyediaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas													
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Penuntutan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	1. Rekonsiliasi Pemungutan dan Penuntutan pajak 43 SKPD 2. Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran SP2D 43 SKPD	86 Dak	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	25.300.000	29.325.000		
5.02.02.2.09	Penyusunan Peraturan Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	Peraturan Bupati Peraturan Daerah Sosialisasi Surat Edaran	3 Bulan 3 Bulan 3 Kali 12 Bulan	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	92.631.900	106.756.685		

Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.00 BADAN KEUANGAN

Kode	Usulan/ Bidang Usuran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan an Prioritas Pembangunan Nasional		
					Capaian Program		Kegiatan Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
5.02.02.2.10	Pelaksanaan Pengendalian dan Perorotan Anggaran Kas dan SPD		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	Laporan Realisasi penerbitan SPD 4 43 SKPD Rekapitulasi Realisasi penerbitan SPD 43 SKPD	172 SPD 43 SKPD	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	25,500,000	29,325,000			
5.02.02.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah												963,066,754	1,107,526,768	
5.02.02.3.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Pemerintahan dan Pengeluaran Kas Daerah		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	1. Laporan Pertanggungjawaban Bulanan 2. Laporan Pertanggungjawaban Trivulenan 3. Laporan Keuangan Semester 4. Laporan Prognosis	16 Dok 180 Buku	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	617,923,950	77,731,778			
5.02.02.3.02	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	1. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2. Penyampaian laporan keuangan daerah ke BPK 3. Penyampaian laporan keuangan daerah ke pusat 4. Konsultasi tentang penyusunan laporan keuangan	20 Buku 2 Dok 4 Kali 1 Kali	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	149,263,400	171,632,910			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.00 BADAN KEUANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.00 BADAN KEUANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prokiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target			
5 02 02 3 03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarolangun	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	Konsultasi Ke BPK Penyampaian Laporan ke Provinsi	4 Kali 3 Dok	Opini BPK terhadap LKPD	1 WTP	75.500,000	29.325,000	
5 02 02 3 04	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarolangun	Opini BPK terhadap LKPD	1 WTP	1. Rancangan Rincian LPP APBD (60 buku) 2. Nota Penyampaian LPP APBD 2020 (60 buku) 3. Perda APBD 2020 (60 buku) 4. Konsultasi ke Provinsi dan Pusat (4 kali) 5. Penyampaian Rancangan Perda LPP ke Provinsi : 4 kali) 6. Penyampaian Evaluasi (1 kali) 7 Penyampaian Perda LPP ke Pusat (1 kali)	180 Buku, 10 Kali	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	191.790,600	220.553,190	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.00 BADAN KEUANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.00 BADAN KEUANGAN

Kode	Unsur/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5.02.02.3.05	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	Opini BPK Terhadap LKPD	67 Lapkeu 4 Kali	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	17,000,000	15,550,000	
5.02.02.3.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	Opini BPK Terhadap LKPD	3 Dok Lanjut LHP BPK (4 dok) Penyampaian LHP ke BPK (4 dok)	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	61,011,300	70,162,995	
5.02.02.3.07	Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembayaran		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	Opini BPK Terhadap LKPD	2 Dok 4 Kali 2 Kali 12 Kali 8 Kali	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	58,786,950	67,604,873	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.00.00.31.00 BADAN KEUANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.02.00.00.31.00 BADAN KEUANGAN

Kode	Unsur/ Bidang Urutan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur			
5 02 02 3 08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan APBD		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	Laporan Analisis	4	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	17.300.000	19.550.000	
5 02 02 3 09	Penyusunan kebijakan dan Penduan Teknis Operasional Pengelolaan Akuntansi Pemerintah Daerah		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	1. Perubahan kebijakan akuntansi pemerintah daerah 2. Perubahan sistem akuntansi pemerintah daerah 3. Perubahan ragan akun standar pemerintah daerah 4. Konsultasi ke propinsi dan ke komite standar akuntansi pemerintah kabupaten/kota 5. Jasa konsultasi pendampingan revisi kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi	182 Buku 1 Kali	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	56.937.754	96.679.477	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.00 BADAN KEUANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.00 BADAN KEUANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Unsur Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan								
					Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur		Target				Hasil Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
5 02 02 2.0 3 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	Sistem dan prosedur akuntansi	60 Buku	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	25.500,000	29.325,000			
5 02 02 2.0 3 11	Verifikasi dan pengujian atas Bukti Memorial		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	1. Laporan Belanja hasil verifikasi 2. Laporan Pendapatan Hasil Perifikasi 3. Dokumen SP2B dan BOS hasil verifikasi 4. Dokumen SPBP BLUD Puskesmas hasil verifikasi 5. Dokumen SPBP BLUD RSUD hasil verifikasi	123 Dok	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	17.000,000	19.350,000			
5 02 02 2.0 3 12	Pelaksanaan Pemantauan dan Sosialisasi Tanggung Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	1. Laporan keuangan daerah 2. Peningkatan SDM Penyusunan laporan keuangan daerah 3. Bimtek penyusunan laporan keuangan 4. Pendampingan penyusunan laporan keuangan	4 Kali	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	245.684,000	282.536,600			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.00.00.00.31.00 BADAN KEUANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.02.00.00.00.31.00 BADAN KEUANGAN

Kode	Unsur/ Bidang Unsur Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Daerah							daerah						
5 02 02 4	Kegiatan Peningjang Urusan													
5 02 02 4 03	Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus	Reformasi birokrasi	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	Terlokasikannya Dana Desa ke 79 Nagari yang bersumber dari APBD	79 Nagari	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	163,941,043,557	188,532,200,091		
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH													
5 02 03 1	Pengelolaan Barang Milik Daerah													
5 02 03 1 01	Koordinasi dan Penyusunan	Meningkatkan Kualitas	Kab. Lima Puluh	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	Buku daftar harga satuan barang dan	55 Buku	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	73,970,300	1,188,925,650	1,367,264,497		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.00 BADAN KEUANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.00 BADAN KEUANGAN

Kode	Unsur/ Bidang Unsur Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan							
					Target		Target		Target					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Standar Harga Beras/ Jans dan Tipe Barang		Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota, Harau, Sarilamak										
5.02.03.2.0.02	Koordinasi dan Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	Penyusunan buku anggaran kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dok	Opini BPK Terhadap LKPD	32.257,500				
5.02.03.2.0.03	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	Penyusunan buku RKMD	55 Buku	Opini BPK Terhadap LKPD	42.621,800				
5.02.03.2.0.04	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Peneliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	Penyusunan buku RKPMO	55 Buku	Opini BPK Terhadap LKPD	59.831,050				
5.02.03.2.0.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	Laporan Keuangan (Buku lampiran aset)	20 Buku	Opini BPK Terhadap LKPD	145.746,210				
5.02.03.2.0.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	Laporan Keuda (Buku inventaris aset)	20 Buku	Opini BPK Terhadap LKPD	95.472,420				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.00.00.00.31.00 BADAN KEUANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.02.00.00.00.31.00 BADAN KEUANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5.02.03.1.2.0.07	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarimarak	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	Pencatatan tanah Sertifikasi tanah	34 Buah 15 Persil	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	184.515.000	272.192.230	
5.02.05.1.2.0.08	Koordinasi Hasil Penelitian Harau Milk Daerah		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarimarak	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	Pencatatan tanah Sertifikasi tanah	34 Buah 15 Persil	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	48.452.000	55.719.800	
5.02.03.1.2.0.09	Koordinasi pengawasan dan pengendalian atas penggunaan, pemanfaatan, pemusatan dan penghapusan Barang Milik Daerah		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarimarak	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	Penghapusan Barang Milik Daerah	32 Buah	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	103.107.000	115.573.050	
5.02.03.1.2.0.10	Koordinasi pengawasan dan pengendalian atas pemindahtanganan Barang Milik Daerah		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarimarak	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	Pemindahtanganan BMD	1 Dok	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	36.908.750	44.745.062	
5.02.03.1.2.0.11	Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarimarak	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	Rekonsiliasi BMD Laporan semester dan 10	20 Buku	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	89.714.000	103.173.400	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.00.31.00 BADAN KEUANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.00.31.00 BADAN KEUANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	dalam Rangka Penyusunan Laporan Berang Milik Daerah		Keuangan Daerah	Harau, Sarilamak										
5 02 03 1	2.0 12		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	Konsolidasi Penyusunan Laporan BMD dari OPD (Laporan Tahunan)	20 Buku	Opini BPK Terhadap LKPD	82.141.000	94.462.150			
5 02 03 1	2.0 13		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	Opini BPK Terhadap LKPD	1 WTP	Bentuk terhadap 43 OPD	43 OPD	Opini BPK terhadap LKPD	250.000.000	287.500.000			
5 02 04 2	2.0 01		Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Sarilamak	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	1 : 0,8	Tersusunnya kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah	1 Duk	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	100.000.000	115.000.000			
5 02 04 2	2.0 02		Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Sarilamak	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	1 : 0,8	Tersusunnya kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah	10 kali	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	283.147.000	325.964.050			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH														
Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah														

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.00 BADAN KEUANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.00 BADAN KEUANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Unsur Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 02 04 2 03	Perumusan Standar sasi Kebijakan Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kelurahan Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	1 : 08	Tersusunnya standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah	1 kali	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	1 : 0,08%	42.136.000	48.456.400	
5 02 04 2 04	Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Meningkatkan Kualitas Pencapaian Keuangan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	1 : 08	12 Perbup dan 3 SK Pembinaan dan Perbaikan Pajak Daerah (Bkal)	15 Dok	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	1 : 0,8%	112.671.800	29.572.570	
5 02 04 2 05	Perumusan Kebijakan Strategi Penyeluluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	1 : 08	3 Raperbup / b SK Keputusan Aparatur pemerintahan negeri dan Wajib Pajak tentang Pajak Daerah/Penyuluhan Pajak Daerah (320 org)	9 Dok 320 Orang	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	1 : 0,8%	205.841.000	236.717.150	
5 02 04 2 06	Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	1 : 08	Pendataan / Pemutakhiran data PBB P@ d IK (32010 data PBB)	32010 Data PBB	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	1 : 0,8%	763.769.000	679.334.350	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.00 BADAN KEUANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.00 BADAN KEUANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Praharaan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Teknologi Informatika			Kelurahan										
5.02.04.2.07	Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kelurahan	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	1 : 08	Penelitian terhadap wajib pajak dan wajib retribusi (2020 SKP)	2000 SKP	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	1 : 0,8%	78.033.000	89.737.950		
5.02.04.2.08	Penyenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kelurahan	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	1 : 08	Penggantian objek pajak dan retribusi (250 Obj)	250 Obj	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	1 : 0,8%	116.700.000	135.515.000		
5.02.04.2.09	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kelurahan	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	1 : 08	>1 pemutakhiran Data objek pajak dan objek retribusi (45 objek pajak)	20 Obj < 25 Obj	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	1 : 0,8%	75.090.000	84.053.500		
5.02.04.2.10	Pemeriksaan Pajak Daerah		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Lima Puluh Kota, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kelurahan	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	1 : 08	Dokumen hasil pemeriksaan pajak	5 Dok	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	1 : 0,8%	57.969.000	66.664.350		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.00 BADAN KEUANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.31.00 BADAN KEUANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Tertarget	Tolok Ukur	Target			
5 02 04 2 11	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	11 Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan 1, Sembilan Kecamatan	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	11 : 08	Dokumen hasil pemeriksaan pajak	4 Dok	149.542.000	17.973.300			
TOTAL											202.550.220, 306	232.932.753, 352	

BAB V

PENUTUP

Terkait dengan penyiapan dan penyediaan dokumen pengelolaan keuangan di tingkat OPD, Badan Keuangan telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Badan Keuangan (Renstra Badan Keuangan) Tahun 2016-2021 yang memuat visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan. Kemudian terkait dengan perencanaan tahunan daerah maka Pemerintah Kabupaten juga telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari kedua dokumen perencanaan di atas maka seluruh OPD perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) masing masing. Sehubungan dengan ini maka Badan Keuangan juga menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Badan Keuangan (Renja Badan Keuangan) Tahun 2021. Renja Badan Keuangan ini memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Badan Keuangan ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Badan Keuangan. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Badan Keuangan, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Badan Keuangan juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Badan Keuangan dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan

maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2021, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Rencana Kerja Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2021 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Badan Keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Sarilamak,

2020

KEPALA BADAN KEUANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19661013 199603 1 001

maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2021, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Rencana Kerja Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2021 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Badan Keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Sarilamak,

2020

KEPALA BADAN KEUANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19661013 199603 1 001